

TESIS

**KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
TERKAIT DENGAN PENGHAPUSAN KONTEN
YANG MENGANCAM NEGARA**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh :

**WILLIAMSON H MANULLANG
NPM : 15310015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2017**

TESIS
KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI TERKAIT DENGAN PENGHAPUSAN
KONTEN YANG MENGANCAM NEGARA



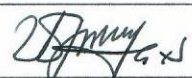
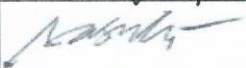
Dipersiapkan dan disusun oleh :

WILLIAMSON H MANULLANG, ST
NPM : 15310015

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 22 Agustus 2017

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan
Dr. Joko Nursariono, SH, M. H.	Ketua	
Dr. Ari Purwadi, SH, M. Hum	Anggota	
Dr. Umi Enggarsasi, SH, M. Hum	Anggota	
Ahmad Basuki, SH, MH	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
tanggal 22 Agustus 2017

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Ari Purwadi, SH, M. Hum

TESIS
KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
TERKAIT DENGAN PENGHAPUSAN CONTENT YANG
MENGANCAM NEGARA

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Diajukan Oleh :

Williamson H manullang
NPM : 15310015

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
Tanggal 15 Agustus 2017

Oleh :

Pembimbing I

acc unt. 2017


Dr. Umi Enggarsasi, SH, M. Hum

Pembimbing II


Ahmad Basuki, SH, MH

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


Dr. Ari Purwadi, SH, M. Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Williamson Hotmatua Manullang, ST
NPM : 15310015
Alamat : Perum Griya Permata Meri D5/ 40 Kota Mojokerto Jawa Timur
No Telp : 085220075044

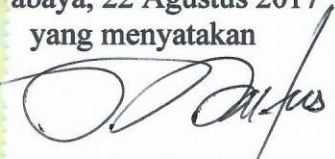
Menyatakan bahwa tesis yang berjudul. “Kedudukan Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Terkait dengan Penghapusan Kontent yang Mengancam Negara” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsure plagiarism maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk ertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.



abaya, 22 Agustus 2017
yang menyatakan


Williamson Hotmatua Manullang
NPM : 15310015

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karunianya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

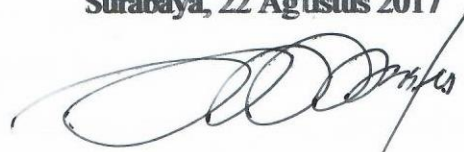
- 1. Prof. Sri Harmadji., dr., SP.THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.**
- 2. Bambang Yunarko, SH, M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Wijaya Kusuma Surabaya.**
- 3. Dr. Ari Purwadi, SH, M. Hum, selaku Ketua Program Studi Magiste Ilmu Hukum.**
- 4. Dr. Umi Enggarsasi, SH, MHum, selaku Dosen Pembimbing I dan Ahmad Basuki, SH, M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.**
- 5. Para Dosen program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan .**
- 6. Kepada kedua orang tua Drs. MT. Manullang dan Suhartiningsih, istri saya Mike dwi Kusmayanti, SE, anak-anak saya Lionel G Manullang dan Kaylarisa D Manullang, kedua adik saya Fransizcus Eliezer Manullang, ST,**

Pricila Eirene Manullang, kedua mertua saya Nanang, SH dan Lilik Setyowati serta adik Ipar saya Ria Trivinata , SH, LLM yang telah memberikan dorongan dan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini .

- 7. Karyawan dan karyawan kantor DISKOMINFO Kabupaten Mojokerto Khususnya Bidang Informatika, Andreas Vidi Wijaya, Pak Ardi Winarno, Mbak Noerana Dibyantarsi dan teman-teman Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017.**

Akhirnya, Penulis juga menyadari Tesis ini masih belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Penulis menerima kritik dan saran yang berguna untuk mendalami tema Tesis ini, dan juga untuk perkembangan Teori Hukum di Indonesia

Surabaya, 22 Agustus 2017



Williamson Hotmatua Manullang

ABSTRAK

Maraknya penyalahgunaan kebebasan informasi melalui media teknologi berimplikasi terhadap penyebaran berbagai informasi maupun pemberitaan yang bersifat mengancam martabat dan harga diri seseorang maupun berbagai hal lain, termasuk kepentingan Negara. Fenomena ini berpotensi mengancam eksistensi Negara. Atas dasar itu perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Kedudukan Hukum Pemerintah dalam Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Terkait dengan Penghapusan Kontent yang Mengancam Negara”** bertujuan : Pertama memahami kedudukan hukum pemerintah dalam penyelenggaraan komunikasi dan informasi. Kedua, memahami wewenang pemerintah untuk melakukan penghapusan terhadap kontent yang mengancam Negara.

Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif. Dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian dalam konteks hukum nasional yang terkait dengan masalah elektronik. Pendekatan yuridis komparatif juga dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan Negara-negara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konsepsi (*conceptual approach*)

Hasil analisa yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam tesis ini terhadap kedudukan hukum pemerintah dalam penyelenggaraan komunikasi dan informasi terkait dengan penghapusan content yang mengancam Negara saat ini adalah, sebelum disahkannya UU ITE terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penghapusan content yang mengancam Negara. Kebijakan formulasi dalam UU ITE masih membutuhkan harmonisasi/sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal terutama dengan instrument hukum internasional terkait dengan teknologi informasi. Upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas terhadap peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana aparat penegak hukum tetapi juga diiringi kesadaran hukum masyarakat

Kata Kunci : Kebijakan, Teknologi Informasi, *Cyber Crime*

ABSTRACT

The rise of misuse of freedom of information through the media of technology has implications for the dissemination of various information and news which threatens the dignity and self-esteem of a person as well as various other matters, including the interests of the State. This phenomenon has the potential to threaten the existence of the State. on that basis, it is necessary to conduct a study entitled "The Status of Government Law in the Implementation of Communication and Information Associated with the Elimination of Content that Threatens State" aims: First understand the status of government law in the implementation of communication and information. Second, understand the authority of the government to eliminate the contents that threaten the State.

This research method is normative law research. By analyzing the laws and regulations relating to research problems in the context of national law related to electronic issues. The comparative juridical approach is also conducted to compare comparisons with Statue Approach and conceptual approaches.

The result of the analysis which can be made as a conclusion in this thesis of the legal status of the government in the implementation of communication and information related to the abolition of content threatening the State at this time is, prior to the enactment of UU ITE there are some statutory provisions related to the elimination of content threatening the State. Formulation policies in the ITE Law still require harmonization and synchronization both internally and externally, especially with international legal instruments related to information technology. Law enforcement efforts are not only limited to the enhancement of the capabilities, facilities and infrastructure of law enforcement officers but also accompanied by legal awareness of the community

Keywords: Policy, Information Technology, Cyber Crime

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
PERNYATAAN ORIGINAL PENELITIAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
1. Komunikasi dan Informasi	7
2. Telekomunikasi dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi	7
3. Ruang Lingkup Telekomunikasi	8
4. Tujuan Dari Undang-undang No. 36 Tahun 1999.....	8
5. Penyelenggaraan Telekomunikasi berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999.....	9
6. Penyelenggaraan Komunikasi	16
7. Perkembangan Transaksi Elektronik.....	19
E. Metode Penelitian	26

	F. Sistematika Pertanggungjawaban.....	28
BAB II	KEDUDUKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI.....	24
	A. Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi.....	24
	B. Kedudukan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi.....	28
BAB III	KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGHAPUSAN TERHADAP CONTENT YANG MENGANCAM NEGARA	36
	A. Konten yang Mengancam Kepentingan Negara.....	36
	B. Kewenangan Pemerintah dalam Penghapusan terhadap konten yang Mengancam Negara	39
	C. Peran Pemerintah dengan menggandeng masyarakat untuk menangani konten yang berpotensi memecah belah bangsa	41
	D. Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/08/2017 Tentang menuju kedaulatan Digital Melalui Aplikasi Lokal	47
	E. Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang- Undang ITE	56
	F. Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi dan Lamanya Pidana dalam Undang-Undang ITE.....	57
BAB IV	PENUTUP.....	69
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran	70

DAFTAR BACAAN